



ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022

Muhammad Yusuf Saputra, Asep Setiawan
Universitas Muhammadiyah Jakarta

yusufsaputra654@gmail.com, asepsetiawanumj2@gmail.com

Abstract (English)

Indonesia was elected to the G20 Presidency at the Riyadh Summit in 2020, with the handover ceremony taking place on October 30-31, 2021. However, during its tenure as G20 President, Indonesia faced various challenges. This research aims to analyze Indonesia's foreign policy during its G20 Presidency. The theory used in this research is Foreign Policy and National Interest. The research approach is qualitative, utilizing secondary data collection techniques in the form of literature studies sourced from books, newspapers, journals, and other sources. The findings of this research indicate that Indonesia has several interests. First, mediating the conflict between Russia and Ukraine to achieve peace for both countries. Second, realizing sustainable energy transitions to prevent climate change. Third, establishing a global health architecture aimed at equity in the healthcare sector post-Covid-19. Fourth, promoting digital and economic transformation to build Indonesia's economy.

Article History

Submitted: 2 August 2024
Accepted: 11 August 2024
Published: 12 August 2024

Key Words

G20, Foreign Policy, National Interest

Abstrak (Indonesia)

Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 pada pertemuan Riyadh Summit tahun 2020, dan prosesi serah terima pada 30-31 Oktober 2021. Namun, selama menjabat sebagai Presidensi G20, Indonesia harus dihadapkan oleh berbagai masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi G20. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Politik Luar Negeri, Kepentingan Nasional. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif melalui teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia memiliki beberapa kepentingan. Pertama, melakukan mediasi konflik antara Rusia dan Ukraina untuk perdamaian bagi kedua negara tersebut. Kedua, mewujudkan transisi energi berkelanjutan untuk mencegah perubahan iklim. Ketiga, mewujudkan arsitektur kesehatan global yang bertujuan untuk kesetaraan dalam dunia kesehatan pasca Covid-19. Keempat, mewujudkan transformasi digital dan ekonomi untuk membangun perekonomian di Indonesia.

Sejarah Artikel

Submitted: 2 August 2024
Accepted: 11 August 2024
Published: 12 August 2024

Kata Kunci

G20, Politik Luar Negeri, Kepentingan Nasional

PENDAHULUAN

G20 adalah sebuah forum yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan di tingkat global. Dibentuk pada tahun 1999, forum ini melibatkan negara-negara dengan pendapatan besar dan pengaruh ekonomi signifikan untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan ekonomi internasional secara inklusif.¹ G20 tidak memiliki sekretariat permanen.

¹A. F. Cooper, & R. Thaku. (2013). *The Group Of Twenty (G20)*. Routledge.





Dalam kerangka kerjanya, G20 memiliki negara tuan rumah yang disebut Presidensi, yang diputuskan dalam forum pertemuan tingkat tinggi berdasarkan rotasi wilayah setiap tahunnya.

Negara-negara anggota G20 memiliki posisi strategis, mewakili 60% populasi dunia, 75% perdagangan internasional, 80% investasi global, dan 85% ekonomi dunia.² Oleh karena itu, agenda G20 berfokus pada diskusi untuk membangun komitmen politik dari para pemimpin ekonomi global dengan tujuan mengatasi hambatan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi global, seperti masalah keuangan, infrastruktur dan investasi, perdagangan, ketenagakerjaan dan pembangunan, teknologi, serta ekonomi digital. Anggota G20 terdiri dari 19 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Rusia, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Australia, Indonesia, India, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Turki, dan Arab Saudi, serta satu organisasi regional yaitu Uni Eropa.³

Pada agenda sebelumnya, yaitu Riyadh Summit (2020) Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi dan proses serah terima pada 30-31 Oktober 2021 pada saat KTT Roma. Pemilihan Indonesia sebagai anggota tetap dalam forum G20 didasarkan pada beberapa alasan penting.⁴

1. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonominya yang tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya, sehingga Indonesia mempunyai hak istimewa untuk bergabung dalam forum tersebut.
2. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India.
3. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga berpotensi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia.
4. Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang sedang berada dalam proses konsolidasi.
5. Indonesia memiliki lokasi geografis yang penting. Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tetap menjadi anggota G20. Tidak diragukan lagi, perlu dicatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang telah mengalami krisis ekonomi yang mengerikan sebelumnya dan telah berhasil mengatasinya dengan cukup baik.

Ada beberapa agenda penting yang akan dilakukan sebagai rangkaian selama agenda pertemuan G20 ini berlangsung. Adapun agenda-agenda tersebut adalah:

- KTT/*Leaders' Summit* sebagai agenda puncak pada proses pertemuan G20, yaitu rapat para kepala negara/pemerintahan.
- Pertemuan Tingkat Menteri/*Ministerial Meetings* sesuai sektor pembahasan dalam *working groups*.
- *Deputies and Sherpa Meetings*. *Deputies Meetings* adalah bagian dari Finance Track, sedangkan *Sherpa Meetings* adalah bagian dari Sherpa Track.
- *Working Groups Meetings*

² D. W. Jorgenson, & K. M. Vu. (2021). The G20 and the world economy: Performance and prospects. *Journal of Policy Modeling*, 43(4), 770-782.

³ Agung Riyanto dan M Fathoni. (2022) "Analisis Ant (Actor Network Theory) Dalam Presidensi G20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 1.1, 23–60.

⁴ Dr. Temjenmeren Ao. (2023). Indonesia's G20 Presidency: Factors and Priorities that set its Agenda. https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=9051&lid=5884.





- Pertemuan yang membahas isu prioritas sector yang diampu oleh kelompok kerja/*working groups*
- *Engagement Groups Meetings* atau pertemuan forum dialog yang menjadi bagian dari G20, membahas isu tertentu secara khusus.⁵

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional, atau yang dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *raison d'État*, merujuk pada tujuan dan ambisi suatu negara, baik dalam konteks ekonomi, militer, atau budaya. Dalam kerangka Studi Hubungan Internasional yang mendominasi, konsep ini dianggap sebagai landasan penting bagi negara dalam menjalankan hubungan internasional. Pemikiran Machiaveli mengenai kepentingan nasional sering dijadikan referensi dalam praktik maupun pengembangan teori, sebagai pembenaran untuk perilaku internasional suatu negara yang mengutamakan kepentingan utama, mengabaikan pertimbangan agama dan moralitas yang lebih dominan pada masa lampau. Negara dianggap turun dari keteraturan ilahi dan harus tunduk pada kebutuhannya sendiri, terutama kepentingan nasional.⁶

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Lebih jauh, Morgenthau menjelaskan kemampuan minimum ini adalah berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik, militer, dan budaya dari gangguan negara lain.⁷

B. Politik Luar Negeri

Penelitian mengenai politik luar negeri, atau yang dikenal sebagai *foreign policy study*, telah diakui sebagai komponen penting dalam Ilmu Hubungan Internasional. Seiring waktu, bidang ini telah mengalami perkembangan signifikan dan kini mencakup berbagai aspek dari ilmu sosial serta disiplin ilmu lainnya seperti ilmu komunikasi, administrasi publik, dan studi keamanan. Bahkan, dalam kajian yang lebih mendalam, teori-teori tentang pembuatan kebijakan juga menjadi fokus utama dalam studi politik luar negeri.

Rosenau berpendapat bahwa politik luar negeri adalah salah satu bidang kajian dalam studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan studi yang kompleks karena melibatkan aspek-aspek eksternal dan internal suatu negara.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi G20, dalam hal ini peneliti fokus terhadap kepentingan nasional Indonesia. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa metode yang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis mengambil data dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan berita. Sumber-sumber ini diambil karena dianggap masih relevan dengan pembahasan yang sedang dibahas oleh penulis. Adapun sumber-sumber tersebut biasanya seperti artikel dari Kementerian Luar

⁵ Indonesia baik.id dan KOMINFO. G20pedia. <https://online.fliphtml5.com/nyzuy/sxti/#p=4>

⁶ Arry Bainus dan Junita Budi Rachman. (2018). "Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies*. 109–15.

⁷ Hans Joachim Morgenthau, Kenneth W Thompson, dan W David Clinton. 1985. "*Politics among nations: The struggle for power and peace.*"

⁸ James N Rosenau. 1976. *World Politics; an introduction*. (The Free Press,).





Negeri, lalu berita tentang G20, dan jurnal yang membahas tentang serba-serbi G20.

PEMBAHASAN

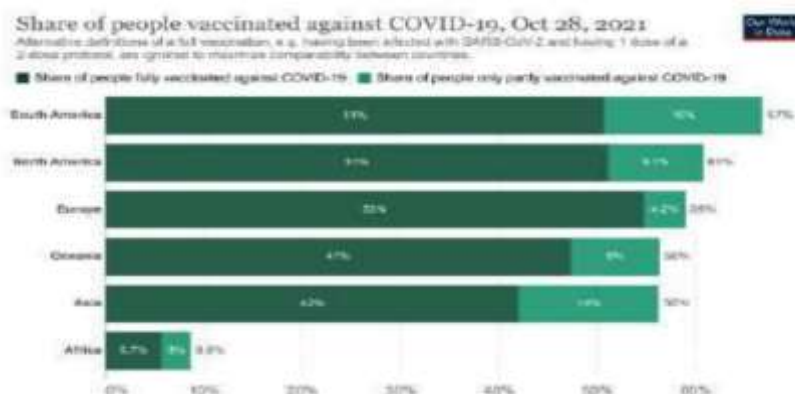
Kepentingan Nasional Indonesia dalam Agenda G20

Sebagai Presidensi G20, setiap negara diberi kebebasan dalam menentukan topik pembahasan. Dengan demikian, pemerintah bisa menjadikan kepentingan nasional Indonesia sebagai agenda utama. Pada G20 kali ini, agenda utama tersebut diantaranya adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan ekonomi, transisi energi berkelanjutan.

A. Wujudkan Arsitektur Kesehatan Global

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menunjukkan orientasi yang mendukung kerja sama internasional di luar lingkup pemerintahan. Indonesia secara aktif berupaya mendorong negara-negara lain untuk mengubah tata kelola kesehatan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah Indonesia terhadap agenda ini didorong oleh harapan bahwa seluruh dunia akan segera pulih dari pandemi COVID-19 dan menjadi lebih siap menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Beberapa masalah yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia terkait dengan agenda ini meliputi kurangnya sistem yang mengatur dan menyimpan dana kesehatan untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa mendatang, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, vaksin, dan obat-obatan, absennya standar protokol kesehatan global sebagai panduan untuk pergerakan manusia, serta kurangnya kerja sama antar negara dalam lembaga riset kesehatan.

Sebagai contoh, Indonesia berupaya untuk mendorong kesetaraan vaksin di Afrika. Hingga akhir tahun 2021, hanya sekitar 5,5% populasi Afrika yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19. Dalam situasi ini, Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan kesetaraan vaksin COVID-19, terutama di Afrika. Afrika memiliki tingkat cakupan vaksinasi COVID-19 terendah di dunia. Walaupun 185,3 juta dosis vaksin telah didistribusikan hingga Oktober 2021 dengan tingkat penyerapan rata-rata mencapai 70%, kurang dari 9% populasi Afrika telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, dan hanya sekitar 5,5% yang telah divaksinasi sepenuhnya. Sebagai perbandingan, 55% penduduk Eropa telah divaksinasi sepenuhnya. Walaupun Asia memiliki tingkat cakupan vaksinasi kedua terendah, jumlah orang yang divaksinasi sepenuhnya di Asia delapan kali lebih banyak dibandingkan di Afrika. Berikut adalah statistik penerimaan vaksin di setiap wilayah.⁹



⁹ Titik Nahilal Hamzah, Sylvia Masri, dan Alia Aninditia Setiawan. (2022). "Peran Indonesia Dalam Presidensi G20 Untuk Kesetaraan Vaksin Di Afrika." *Jurnal Hubungan Luar Negeri*. 40–68.





Gambar: Pemerataan Vaksin COVID-19
Sumber: our world in data

Jika melihat gambar di atas, terlihat jelas bahwa adanya ketidaksetaraan dalam pemerataan distribusi vaksin. Ini membuktikan bahwa akses vaksin lebih gampang bagi negara-negara maju dan memiliki kekayaan daripada kebutuhannya. Dengan demikian, untuk mencegah kesenjangan dalam hal kesehatan, diperlukan suatu upaya yang dilakukan secara global dan tentunya harus strategis serta memiliki langkah yang jauh ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal semacam ini lah yang sangat diperjuangkan oleh Indonesia agar tidak adanya ketimpangan dalam hal kesehatan di seluru dunia.

Melalui KTT Kesehatan Global, Anggota G20 berkomitmen untuk mempromosikan distribusi vaksin yang merata ke negara-negara tertinggal dan berpendapatan rendah melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kesehatan Global, meskipun belum merinci rencana khusus. Negara-negara anggota bekerja sama dengan *Covax Facility* dan menawarkan bantuan melalui berbagai organisasi. Presidensi Indonesia mengumumkan pengumpulan dana sebesar US\$ 1,5 miliar untuk *Pandemic Fund*, sebagai upaya global untuk mengantisipasi pandemi di masa depan. Selain itu, IMF telah mengumpulkan USD 81,6 miliar untuk mendirikan *Resilience and Sustainability Trust* (RST) guna membantu negara-negara yang menghadapi krisis.¹⁰

B. Wujudkan Transformasi Digital dan Ekonomi

Transformasi ekonomi digital telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, dan pandemi telah mempercepat proses ini. Gaya hidup online akan terus ada, dengan beberapa aspek dijalankan secara hybrid (online dan offline) setelah pandemi. Dalam satu atau dua dekade ke depan, ekonomi digital diperkirakan akan meluas, dengan semua sektor ekonomi di seluruh dunia mengalami digitalisasi. Untuk bertahan dan berkembang, bisnis perlu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan ini. Dari sudut pandang ekonomi, transformasi digital dapat menyebabkan pergeseran menuju ekonomi digital. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekonomi digital sangat terkait dengan globalisasi, karena perusahaan mengalami arus besar yang dipicu oleh digitalisasi dan internet. Pemulihan ekonomi yang berhubungan dengan transformasi digital dapat dicapai melalui investasi pembangunan, kerja sama dengan perusahaan teknologi global, serta sektor-sektor seperti pariwisata dan belanja online, terutama selama periode pemulihan ekonomi.¹¹

Indonesia percaya bahwa DEWG dapat mempercepat Agenda Transformasi Digital Indonesia dan memperkuat kolaborasi antar negara dalam mendukung pemerataan serta transformasi berbasis digital yang berkelanjutan untuk pemulihan global. Expo Transformasi Digital yang akan diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bertujuan untuk menggambarkan perjalanan transformasi digital Indonesia di berbagai sektor, termasuk perdagangan, e-commerce, teknologi finansial, pendidikan digital (edu-tech), dan kesehatan (health-tech). Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memanfaatkan teknologi metaverse dalam pelaksanaan Expo Transformasi Digital.¹²

Ada beberapa isu yang dapat mempercepat transformasi digital dalam negeri menjadi semakin masif, yaitu: konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19, literasi

¹⁰ Lian Mutiara Timur dan Rio Sundari. (2023). “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Presidensi G-20 di Bali.” *Journal of Diplomacy and International Studies*. 65–85.

¹¹ H. Hurin, & D. Dilla. (2023). Transformasi Digital Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca Covid 19. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 5(2), 173-185.

¹² Siaran Pers No. 213/HM/KOMINFO/08/2023. Wujudkan Transformasi Digital, Indonesia Ajak G20 Optimalkan Kolaborasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi. https://www.kominfo.go.id/content/detail/50909/siaran-pers-no-213hmkominfo082023-tentang-wujudkan-transformasi-digital-indonesia-ajak-g20-optimalkan-kolaborasi/0/siaran_pers





digital dan keterampilan digital, serta aliran data bebas dengan kepercayaan (DFFT) dan aliran data lintas batas (CBDF).¹³ Namun, meskipun ada banyak cara untuk mempercepat kemajuan transformasi digital, transformasi digital di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, keamanan siber, regulasi yang perlu disesuaikan, dan literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Transformasi digital di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan transformasi ini berjalan sukses.

C. Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Dalam agenda transisi energi, pemerintah Indonesia mengajak seluruh negara untuk mencapai kesepakatan global dengan mempercepat program transisi energi. Agenda ini bertujuan untuk menjembatani dan mendorong negara-negara maju serta negara-negara berkembang agar mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Namun, dalam agenda ini, peneliti menemukan bahwa indikator yang paling dominan adalah pendanaan untuk membiayai proses transisi energi. Peneliti mencatat bahwa strategi Indonesia terhadap agenda ini masih bergantung pada bantuan, baik dukungan finansial maupun teknologi, dari negara-negara maju. Di tingkat domestik, pemerintah Indonesia mengakui bahwa diperlukan pembiayaan yang besar untuk mencapai netralitas karbon, karena biaya pengembangan teknologi energi baru terbarukan (EBT) masih mahal dibandingkan dengan energi fosil. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten dalam EBT masih minim, dan pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta dalam proses transisi energi sehingga biaya yang dibutuhkan tidak sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara.¹⁴

Pada agenda G20, pertemuan untuk membahas terkait isu transisi energi ini bernama *Energy Transitions Working Group (ETWG)*. Pada sidang pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada 24-25 Maret yang dihadiri oleh 20 perwakilan dari negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional. Agenda sidang tersebut membahas tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. Dari segi proses, negara-negara anggota G20 sepakat bahwa ETWG harus menghasilkan hasil yang lebih konkret. Hasil sidang ETWG pertama di Yogyakarta akan ditinjau perkembangannya pada pertemuan ETWG kedua di Labuan Bajo pada bulan Juni 2022. Diharapkan, pada pertemuan ETWG ketiga pada September 2022, negara-negara G20 akan menyepakati keluaran dan komunike Menteri Energi G20. Selain ETWG, berbagai pertemuan lain seperti Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM), webinar, forum investasi, dan acara paralel lainnya juga diselenggarakan untuk menyukseskan forum transisi energi G20.¹⁵

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia memanfaatkan peran sebagai Presidensi G20 untuk menarik investor dari negara maju dan memainkan peran penting dalam transisi energi berkelanjutan, sekaligus mengangkat isu-isu perubahan iklim. Forum G20 memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan menyeimbangkan antara konservasi alam dan pembangunan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia berjuang untuk kesetaraan global, terutama dalam distribusi vaksin Covid-19, dan

¹³ Lian Mutiara Timur dan Rio Sundari. (2023). "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Presidensi G-20 di Bali." *Journal of Diplomacy and International Studies*. 65–85.

¹⁴ C. Ramadhanto, T. D. Sudiarto, & B. K. Pramono. (2022). Analisis Konten Agenda Prioritas Indonesia pada Presidensi G20. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 16757-16774.

¹⁵ <https://migas.esdm.go.id/post/menteri-esdm-buka-rangkaian-g20-energy-transitions-working-group-minggu-depan-peran-publik-sangat-penting>. Diakses pada Agustus, 7 2024.





mengajak anggota G20 untuk mengatasi kesenjangan kesehatan. Sebagai anggota aktif G20, Indonesia memajukan kepentingan negara berkembang dan mendorong sistem ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap fokus pada kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bainus, Arry, dan Junita Budi Rachman. (2018). “Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional.” *Intermestic: Journal of International Studies*. 109–15.
- Cooper, A. F, & Thakur, R. (2013). *The Group Of Twenty (G20)*. London: Routledge.
- Hamzah, Titik Nahilal, Sylvia Masri, dan Alia Aninditia Setiawan. (2022). “Peran Indonesia Dalam Presidensi G20 Untuk Kesetaraan Vaksin Di Afrika,” *Jurnal Hubungan Luar Negeri*. 40–68
- Hurin, H. & D. Dilla. (2023). Transformasi Digital Dalam Pemulihan Perekonomian Pasca Covid 19. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 5(2), 173-185.
- Jorgenson, D. W., & Vu, K. M. (2021). The G20 and the world economy: Performance and prospects. *Journal of Policy Modeling*, 43(4), 770-782.
- Morgenthau, Hans Joachim, Kenneth W Thompson, dan W David Clinton, “Politics among nations: The struggle for power and peace,” 1985
- Ramadhanto, C., Sudiarto, T. D., & Pramono, B. K. (2022). Analisis Konten Agenda Prioritas Indonesia pada Presidensi G20. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 16757-16774.
- Riyanto, Agung, dan M Fathoni. (2022). “Analisis Ant (Actor Network Theory) Dalam Presidensi G20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban.*, 23–60
- Rosenau, James N. 1980. “The scientific study of foreign policy.” (*No Title*).
- Timur, Lian Mutiara, dan Rio Sundari. (2023). “Journal of Diplomacy and International Studies STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20 DI BALI,” *Journal of Diploma6cy and International Studies*, 6.1, 60–85

